

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	100 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.000.000,00					2.500.000,00	-2.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000,00					2.500.000,00	-2.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00					2.500.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.000,00					25.000,00	-25.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.000,00					25.000,00	-25.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					50.000,00					25.000,00	-25.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					50.000,00					25.000,00	-25.000,00
	[-] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000,00					25.000,00	-25.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	166 Lembar	Lembar	300,00	-	49.800,00	83 Lembar	Lembar	300,00	-	24.900,00	-24.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.950.000,00					2.475.000,00	-2.475.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.950.000,00					2.475.000,00	-2.475.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.950.000,00					2.475.000,00	-2.475.000,00
	[#] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.950.000,00					2.475.000,00	-2.475.000,00
	[-] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota					4.950.000,00					2.475.000,00	-2.475.000,00

